

HASIL PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN

**KOMUNITAS
MANTAN NARAPIDANA
TERORIS POSO**

HASIL PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN

KOMUNITAS MANTAN NARAPIDANA TERORIS POSO



REPORT OF WISDOM INSTITUTE

Penulis :

Dr. H. Lukman S. Thahir, MA

Editor:

- 1. Dr. Hamian**
- 2. M. Nur Faizi**
- 3. Taufik Kambayang**

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendampingan Komunitas Mantan Napi Teroris Poso tahun 2018-2019 dapat diselesaikan sesuai target dan rencana yang ditetapkan. Kegiatan penelitian dan pendampingan ini merupakan ikhtiar dari Yayasan Wisdom Institute Sulawesi Tengah-Indonesia untuk mengisi dan memberi kontribusi kepada pemerintah RI dalam rangka membantu dan menawarkan konsep pencegahan terorisme di Indonesia, khususnya mereka eks narapidana teroris di Sulawesi Tengah.

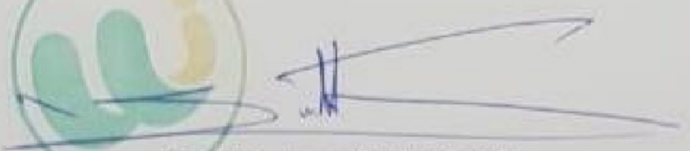
Penyusunan laporan ini banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, sehingga kegiatan penelitian dan pendampingan eks narapidana teroris Poso tahun 2018-2019 dapat diselesaikan. Secara khusus disampaikan terima kasih kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Badan Intelijen Negara RI, dan Pemerintah

Sulawesi Tengah, khususnya Gubernur dan Bupati, Polda Sulawesi Tengah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan laporan ini dengan kerendahan hati, kami mohon maaf. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Semoga laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan program pendampingan eks napiter Poso ini dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Palu, 9 Desember 2019
Direktur Eksekutif Wisdom Institute



Dr. H. Lukman S. Thahir, MA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Utama Program Penelitian dan Pendampingan	8
C. Deskripsi Program	8
D. Target dan Tujuan Pendampingan	11
E. Desain Program Pendampingan	12
BAB II: STUDI TEORITIS MEMUTUS MATA RANTAI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA	
A. Indonesia dan Program Counter-Terrorism	15
B. Model Disengagement Eks Narapidana Teroris Poso	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN: DARI TERORIS MENJADI PEJUANG PERDAMAIAN	
A. Eksistensi Eks Napiter Poso sebelum Proses Pendampingan	27
B. Prose Pendampingan Eks Narapidana Teroris Poso	35
C. Identitas Eks Napiter Pasca Pendampingan	46
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, diskursus tentang Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menempati posisi yang sangat strategis dan signifikan di dunia internasional, khususnya dalam masalah penanganan ancaman terorisme global. Signifikansi Indonesia ini dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian, di antaranya:

Pertama, pasca terjadinya peristiwa serangan Al-Qaeda terhadap menara World Trade Center, di Amerika, tanggal 11 September 2001, di Barat, meminjam analisis Bisel,¹ sebagaimana ideologi komunis tahun 1991, gerakan revolusi Islam dicaci maki. Karena itu sangat pantas untuk kemudian mempelajari Islam sebagai kekuatan keras dalam relasi internasionalnya, tidak hanya di dunia Arab, tetapi juga

1 Roger E. Bisel, "A Commentary on Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia", dalam Max L. Groos, *A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia*, (Washington DC:National Defence Intelligence College, 2007), h. ix

di negara-negara yang memiliki jumlah kelompok Muslim terbesar di dunia, tepatnya di Asia Tenggara, khususnya mengambil pelajaran penting atas fenomena Islam di Indonesia.

Kedua, dengan populasi muslim lebih dari 230 juta jiwa, atau 89% penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia bukan hanya salah satu tujuan utama rekrutmen calon-calon radikal dan teroris,² tetapi juga menjadi tempat persemaian gerakan terorisme internasional seperti Al-Qaeda dan ISIS. Bukti bersemainya kedua ideologi transnasional ini, meminjam hasil laporan Bruce Vaughn, dkk., dalam *Terrorism in Southeast Asia*, ditandai dengan terungkapnya jaringan teroris PAN Asia, yang berhubungan langsung dengan Al-Qaeda setelah beberapa minggu serangan 11 September 2001 di Amerika. Jaringan ini dikenal dengan Jamaah Islamiyah yang ditemukan memiliki sel-sel jaringan di Indonesia.³ Sementara Pengaruh ISIS di Indonesia, meminjam analisis Jasminder Singh,⁴ RSIS Nanyang Technological University, ditandai dengan banyaknya pengikut ISIS dari Indonesia, yang dikenal dengan

2 Lihat Francisco Galamas, "Terrorism in Indonesia: An Overview", *Research Papers*, 04, 2015, h. 2-4

3 Bruce Vaughn, at.all, *Terrorism in Southeast Asia*, CRS Report for Congress, October 16, 2009, h. 2 bandingkan dengan Fitriani, dkk., "The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses, CSIS Working Paper Series WPSPOL-02/2018 , h. 2-3

4 Jasminder Singh, "Operation Tinombala: Indonesia's New Counter-Terrorism Strategy", dalam *RSIS Nanyang Technological Univerasity*, nomor 251, 7 October 2015, h. 2

istilah Katibah Nusantara. Bahkan, Indonesia menurut Jasminder, memiliki pengikut ISIS terbesar di Asia Tenggara, di antaranya, MIT, salah satu jaringan ISIS yang dipimpin oleh Santoso, di Poso Sulawesi Tengah.⁵

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia bersama United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC) melakukan kerjasama dalam upaya penanganan dan pencegahan berbagai bentuk pola *criminal justice* yang terkait dengan masalah ancaman terorisme melalui Badan yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pembentukan BNPT ini, terutama dengan program deradikalisasinya, di satu sisi, telah membawa harapan baru bagi masyarakat dalam hal menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti pendekatan hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang pro-kekerasan atau para mantan narapidana dan narapidana terorisme di berbagai Lapas di Indonesia, namun di sisi lain, karena program ini tidak terintegrasi dengan institusi-institusi lainnya, seperti Kepolisian RI dan Lapas di Indonesia misalnya, maka konsep deradikalisasi ini, terutama pola pembinaan mentalitas dan cara pikir narapidana teroris yang dilakukan oleh BNPT, Kepolisian RI, maupun Lapas di berbagai daerah dianggap belum berhasil dengan baik—untuk tidak menyatakan gagal.

Situasi tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi peme-

5 *Ibid.*

rintah untuk membenahi sistem penanganan narapidana kasus terorisme dan mantan narapidana terorisme. Hal ini harus dilakukan karena narapidana terorisme rentan kembali melakukan aksi teror setelah keluar dari tahanan. Sebab, mereka kerap kembali ke jaringannya lantaran lebih merasa mendapat dukungan.

Banyak dari mereka yang ketika keluar dari penjara disambut oleh jaringan lamanya yang kemudian memberikan dukungan secara sosial dan finansial. Hal tersebut terjadi karena sistem penanganan terorisme yang dibangun pemerintah masih parsial. Penekanan pemerintah masih pada aspek keamanan saja, sementara pembinaan terhadap narapidana atau mantan narapidana teroris itu sendiri kurang diperhatikan. Di sisi lain, masing-masing lembaga bekerja secara terpisah dan berasumsi bahwa pembenahan kedua aspek moral dan finansial untuk memenuhi kebutuhan para mantan narapidana terorisme bukanlah bagian dari tugas kelembagaannya. Polisi merasa itu bukan bagian dari tanggungjawabnya, sedangkan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sosial sama-sama merasa tidak punya sumber daya yang memadai.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan sistem yang lebih menyeluruh dalam penanganan terorisme, khususnya penanganan dan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme. Misalnya, siapa yang menangani proses asimilasi dan apa program pembinaannya, sehingga

mereka tidak berbahaya ketika dilepas kembali ke dalam masyarakat. Sebagai contoh, peristiwa yang dialami oleh Iqbal Khusaeni alias Iboy alias Ramli alias Rambo, mantan narapidana teroris yang ditangkap di Cipayang, Jakarta Timur pada 21 Agustus 2013 lalu, ternyata terlibat lagi dalam sejumlah kasus penyediaan senjata atau kasus aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku pengeboman gereja tersebut adalah Juhanda (32 tahun), yang sebelumnya pernah mendekam di penjara karena upaya peledakan di Serpong pada tahun 2011. Contoh lainnya adalah satu orang mantan narapidana teroris Poso yang ditangkap di Kabupaten Tojo UnaUna, Sulawesi Tengah, yang berinisial MR, yang menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Mabes Polri RI, ditengarai melakukan *fa'i'* (pencarian dana melalui perampokan) dengan melakukan pencurian motor untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam melakukan aksi teror mereka.⁶

Kasus terkini yang banyak diperbincangkan di Sulawesi Tengah adalah keributan antara Rahman Larangke dan Tamrin (anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Poso) dengan Wirahadi alias Hadi (mantan narapidana terorisme bom Sampodo Makassar, yang beralamat di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir) dan Zainul alias Nul

6 Lihat Lukman S. Thahir, dkk., "Paradigma Baru Penanganan Narapidana Terorisme di Sulawesi Tengah", dalam *Jurnal Istiqro'*, Vol. 2, 2018

(mantan narapidana terorisme kasus kekerasan Poso, yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir) yang terjadi pada 3 Maret 2017, pukul 10.30 Wita, di Kantin Kantor Pemda Kabupaten Poso, Jl. Pulau Sumba No. 1, Kelurahan Gebangrejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Keributan tersebut dipicu sikap Wirahadi yang tidak terima teguran anggota Satpol PP saat memarkir kendaraan roda dua di sekitar pintu masuk Kantor Bupati Poso. Kemudian dilakukan pertemuan, yang difasilitasi oleh Sophian Jumpai alias Pian (mantan narapidana terorisme kasus kekerasan Poso) antara Wirahadi dan Zainul alias Nul dengan para anggota Satpol PP di Warkop Kembar Jl. Pulau Sumba Kelurahan Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota disaksikan oleh Kanit Intelkam Polres Poso (Ipda La Ode) serta anggota Unit Intel Kodim Poso. Akhirnya, kedua belah pihak pun telah saling memaafkan. Menurut Abdul Malik Saleh, S. Sos, M. Si, Dosen FISIP Unsimar Poso yang berada di TKP saat kejadian, mengatakan bahwa persoalan parkir sembarangan hanya pemicu (*triggering factor*) dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu akumulasi kekecewaan mantan narapidana terorisme/eks-combatan Poso kepada Bupati Poso Darmin A. Sigilipu yang tidak memberikan perlakuan istimewa kepada mereka. Sementara itu, pada masa pemerintahan Bupati Piet Ingkiriwang, Pok Raka mendapat perlakuan istimewa berupa jatah proyek dan berbagai fasilitas sehingga terkesan mereka merupakan kelompok

eksklusif, bahkan dapat mengintimidasi para Kepala Dinas dan Kepala Kantor jika menginginkan sesuatu.

Tanggapan senada disampaikan oleh Ali Badjeber, seorang akademisi dan ketua DPC Garda Pemuda Partai Nasdem pada 16 Maret 2017, di Warkop Bunda Jl. Tanjumbulu, Poso Kota. Menurutnya, Pok Raka Poso menjadi ancaman nyata bagi pemerintahan Bupati Darmin A. Sigilipu menyusul adanya statmen yang bersangkutan, 'Jangan harap celana puntung itu bisa dapat proyek' (istilah celana puntung adalah simbol dari para mantan combatan dan napiter Poso). Pernyataan Bupati Darmin A. Sigilipu tersebut telah sampai ke mantan combatan dan napi teroris Poso. Selain itu, kebijakan Bupati Darmin A. Sigilipu telah membuat kondisi perekonomian mantan combatan/eks napiter Poso terpuruk. Sementara beberapa even dan kegiatan yang disponsori oleh Pemda Poso seperti Festival Danau Poso 2016 dan HUT Kota Poso yang ke 122 tahun 2017, terkesan hanya menghamburkan uang. Sebelumnya Sdr. Kifli (Kelahiran Minahasa 1 maret 1988, Alamat: Jln. Pulau Irian Poso Kota) yang ditangkap oleh Densus 88 di Kabupaten Tolitoli pada 10 Maret 2017, pernah melontarkan pernyataan, 'Jika begini sulitnya cari uang, lebih baik jadi teroris'.⁷

Laporan ini merupakan salah satu dari upaya untuk mengisi ruang kosong yang tidak tersentuh oleh pemerintah, dalam hal ini pihak BNPT dan institusi kepolisian, dalam hal

⁷ Data diperoleh dari Binda Sulawesi Tengah, 2018.

bagaimana melakukan proses pelepasan (*disengagement*) terhadap mantan narapidana teroris Poso di satu sisi, dan perubahan peran mereka dari teroris menjadi pejuang perdamaian, di sisi lainnya, melalui riset akademik dan program pendampingan.

B. Masalah Utama Program Pendampingan dan Pemberdayaan

Ada dua masalah utama program pendampingan dan Pemberdayaan Mantan Narapidana Teroris di Poso:

1. Bagaimana deskripsi diri dari mantan narapidana teroris yang menjadi sasaran pendampingan ini dan Masalah riil apa saja yang dihadapi oleh mantan narapidana teroris Poso pasca ke luar dari Lapas?
2. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan kepada mantan narapidana teroris Poso?
3. Bagaimana Bentuk Pemberdayaan Diri di kalangan eks napiter Poso?

C. Deskripsi Program

Nama Program ini adalah “Pendampingan dan Pemberdayaan Mantan Napi Teroris di Sulawesi Tengah. Yang dimaksud dengan Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan bagi komunitas mantan napi teroris dengan menempatkan tenaga pendamping atau *community worker* sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan

dinamisator. Terkait proses pendampingan yang dilakukan, prinsip utamanya meminjam model Malcolm Payne,⁸ adalah *"making the best of the client's resources"*. Untuk menerapkan prinsip ini, ada tiga program pendampingan yang akan dilakukan, yang antara satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Studi Pendahuluan.

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui deskripsi diri dan masalah riil yang dihadapi para mantan napi teroris pasca keluar dari penjara dan bagaimana respon masyarakat atas keberadaan mereka. Upaya ini dimaksudkan agar team community worker dapat menyiapkan berbagai argumentasi, kajian teoritis dari berbagai literatur yang nantinya akan menjadi pedoman untuk membimbing, mendorong dan menuntun para mantan napi teroris dalam merumuskan dan memecahkan masalahnya sendiri. Kegiatan ini meliputi dua aspek :

- Personal Approach terhadap eks Napi Teroris dan respon atas persepsi publik pasca mantan napi teroris kembali ke masyarakat
- Eksplorasi/Identifikasi dan Pemetaan masalah yang dihadapi mantan napi teroris

⁸ Malcolm Payne, *Social care in the Community*, (London: Macmillan, 1998), h. 26

2. Kajian Teoritis tentang masalah Riil Mantan Napi Teroris

Setelah memahami masalah riil yang dihadapi oleh masing-masing mantan napi teroris pasca keluar dari penjara, dan respon masyarakat atas kehadiran mereka, dirumuskanlah kajian teoritisnya dalam bentuk skema kerja atau desain program pendampingan untuk ditawarkan kepada para pakar, pemerhati teroris, masyarakat, tokoh agama dan pihak stekholder terkait, melalui kegiatan:

- FGD dengan pakar (konfirmasi hasil riset)
- Desain Program Pendampingan

3. Pelaksanaan Pendampingan dan pemberdayaan eks Napi Teroris

Karena tahapan ini dimaksudkan untuk merubah mentalitas atau *mind seat* mantan napi teroris, dari mentalitas radikal dan teroris ke arah deradikal dan non-teroris, maka langkah-langkah yang dilakukan lebih bersifat psikologis dan religius, dengan menerapkan proses konseling individual dan kolektif, melalui beberapa tahapan:

- Dialog mendalam dengan menggunakan pendekatan Neuro-Linguistic Programming
- Pelatihan Karakter building dan Public Speaking

- Pelibatan dalam aktivitas sosial / membangun aktualisasi diri melalui seminar atau dialogi interaktif dengan masyarakat
4. Ekspose hasil pendampingan atau Seminar Hasil.

D. Target dan Tujuan Pendampingan

Target dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pendampingan ini adalah:

1. Terjadinya transformasi mental dari Napi teroris menjadi Non-teroris, dengan indikator:
 - a. Terbentuknya karakter diri yang open minded, positif thinking, dan santun
 - b. Terbangunnya penerimaan yang sehat oleh masyarakat terhadap eks Napi teroris
 - c. Terjalin kerjama antara mantan napi teroris dengan masyarakat dan pemerintah
 - d. Eks Napi teroris dapat bersosialisasi dengan normal dengan masyarakat sekitarnya
2. Perubahan peran eks Napi teroris dari objek menjadi subjek Perdamaian (Aktualisasi diri)
 - a. Menjadi Nara Sumber dalam berbagai kegiatan Counter terrorism
 - b. Menjadi pelopor perdamaian. Salah satu dari mantan napi teroris ini akan dibuatkan film dokumenternya (Kegiatan ini untuk penelitian lanjutan).

E. Desain Program Pendampingan

Karena program pendampingan mantan napi teroris ini berbasis riset dan partisipatif approach, maka desain program pendampingan ini dipetakan menjadi dua:

1. Untuk berbasis riset, seperti upaya menggali eksistensi eks napiter dan akar-akar masalah riil yang dihadapi para mantan napi teroris pasca keluar dari penjara, digunakan model penelitian kualitatif, dengan sumber data primernya, field research, melalui observasi dan wawancara sebanyak 5 orang mantan napi teroris yang diprioritaskan untuk menjadi pelopor perdamaian dari 122 mantan napi teroris di Sulawesi Tengah, diutamakan mereka yang memiliki pengaruh di kalangan eks napiter dan memiliki hubungan emosional dengan peneliti, khususnya mereka yang pernah dibina oleh tim peneliti selama mereka berada di Lapas Palu dan Ampana. Sedang data sekundernya, melalui library research. Untuk analisis data dilakukan editing terhadap hasil wawancara. Selanjutnya digunakan model coding, yaitu mengklasifikasi jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Untuk lokasi penelitian ditempatkan di Kab. Poso dan Palu.

2. Untuk melaksanakan pendampingan, pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi descriptive dan Participatory Action Research. Pola yang pertama dimaksud untuk menghindari prasangka dan subjektivitas peneliti agar mereka yang diteliti benar-benar menggambarkan kenyataan langsung yang mereka alami, bukan persepsi peneliti. Sedangkan pola yang kedua merupakan salah satu model pendekatan yang bersifat bottom-up, ditentukan oleh para napi teroris itu sendiri. Pendekatan ini mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para mantan napi teroris dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka agar dapat mengembangkan diri mereka.

Ada 4 strategi yang digunakan, a). Mengetahui kondisi para mantan napi teroris, dan b).. Memahami persoalan utama para mantan napi teroris. c. Merencanakan aksi pemecahan masalah dengan para mantan napi teroris, dan ke 4. melakukan aksi.



BAB II MEMUTUS MATA RANTAI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA

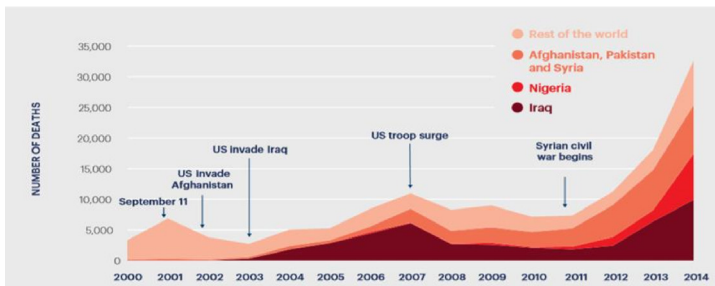
A. Indonesia dan Progran Counter Terorisme

Terorisme dianggap sebagai masalah yang sangat mendesak dan tak terelakkan di dunia, karena dampaknya tidak hanya mengancam keamanan nasional, integritas dan ekonomi,⁹ tetapi juga mengancam hak hidup umat manusia.¹⁰ Dalam laporan The Global Terrorism Index, 2015, diungkapkan bahwa kematian dari terorisme telah meningkat secara dramatis selama 15 tahun terakhir. Jumlah orang yang telah meninggal karena aktivitas teroris telah meningkat sembilan kali lipat sejak tahun 2000. Di tahun 2014, jumlah total kematian dari aktivitas terorisme

9 Lihat Samiullah, Ghani Rahman, Shehla Gul, Shakeel Mehmood, “Impacts of Operation Zarb-e-Azb on Spatio-temporal Distribution of Terrorist Incidents in Khyber Pakhtunkhwa”, dalam *Abasyn Journal of Social Sciences*, Volume 10, Special Issue November 2017, h. 137

10 Lihat Fact Sheet No. 32, “Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism”, dipublikasikan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland.

mencapai 32.685, meningkat 80 persen dari 18.111 tahun sebelumnya. Ini adalah tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Sebagian besar kematian ini, lebih dari 78 persen, terjadi hanya di lima negara; Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan dan Suriah.¹¹ Untuk jelasnya, lihat gambar di bawah ini:



Gambar 1. Angka Kematian akibat terorisme

Meski terorisme sangat terkonsentrasi di sejumlah kecil negara, namun dampaknya, terutama jumlah negara yang memiliki serangan teroris juga meningkat. Di tahun 2014, misalnya, negara yang terdampak terorisme lebih banyak daripada sebelumnya. Serangan tercatat di 93 negara, naik dari 88 di 2013. Trend ini terus meningkat dengan lebih banyak negara mengalami serangan teroris dan kematian setiap tahun,¹² termasuk Indonesia. (Lihat gambar 2)

11 Lihat Global Terrorism Index 2015, Measuring and understanding the Impact of Terrorism, (Sydney, New York and Mexico: Institute for Economic and Peace), h. 24

12 *Ibid.*



Gambar 2. Peningkatan Jumlah Negara akibat terorisme

Dengan semakin meningkatnya jumlah negara dan kematian setiap tahunnya akibat serangan kelompok teroris, maka gendrang melawan terorisme global menjadi keniscayaan setiap negara. Indonesia, misalnya, terutama pasca pemboman Bali, 2002, mengambil tiga langkah strategis untuk mencegah peningkatan terorisme. Pertama, tanggal 4 April 2003, mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua, tanggal 26 Agustus 2004, membentuk Pasukan Khusus Anti Teror atau “Detasemen Khusus 88”, dan ketiga, tanggal 16 Juli 2010 membentuk Badan Nasional Pencegahan Terorisme.

Dengan terbentuknya payung hukum dan pembentukan dua lembaga ini, Indonesia mempertegas perannya dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme di dunia. Indonesia kerap sekali disebut sebagai salah satu contoh

negara yang berupaya mewujudkan langkah deradikalisasi terhadap narapidana atau mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi diklaim oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme yang efektif. Diskursus deradikalisasi mengemuka seiring dengan serangkaian keberhasilan penangkapan ratusan orang yang terlibat dalam jejaring kelompok terror di Indonesia. Berbagai komentar di arena internasional menganggap kontra-terorisme di Indonesia berhasil dengan merujuk pada banyaknya jumlah orang yang ditangkap terkait terorisme. Berdasarkan potret itu pula, majalah *Time* pun menilai bahwa kontra-terorisme di Indonesia adalah potret keberhasilan yang patut dijadikan contoh di arena internasional. Tim kepolisian dalam Detasmen 88 Anti Teror dinilai sebagai sebuah tim anti terror yang kuat dan baik. Zachary Abuza, pengamat terorisme dari Simmon College, Boston, bahkan menyebut tak ada negara lain yang cukup layak untuk dianggap sukses selain Indonesia dalam hal kemajuan dalam kapabilitas operasi kontra-terorisme.¹³

Kesuksesan pemberangusan jejaring terorisme ini ditengarai tak terlepas dari pengejawantahan “program” yang diklaim sebagai upaya deradikalisasi yang sepenuhnya dijalankan oleh kepolisian diantaranya melalui konseling spiritual, dan memperlakukan tahanan teroris dengan

13 Lihat Sarie Febriane dan Mariamah, “Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia”, dalam *Global* Vol. 15 No. 2 Mei 2013-Desember 2013, h. 141

baik. Sarlito Wirawan, psikolog yang kerap bekerja sama dengan kepolisian mengatakan kepada Time bahwa tanpa harus memiliki penjara Guantanamo, Indonesia sukses membongkar jejaring terror karena mampu memahami kondisi psikis para teroris. Oleh karena itu, sebagian tahanan teroris pada akhirnya bersedia bekerja sama untuk mengungkap jaringan mereka.¹⁴

Namun, proses counter-terorism ini, dalam perkembangannya, tindakan penanganan terorisme menyisakan berbagai masalah, terutama antara penegakan hukum di satu sisi dan pencegahan di sisi lainnya, dan karena itu perlu dipikirkan kembali konsep, pendekatan dan strategi counter-terorismenya. Meminjam analisis Institute for Policy Analysis of Conflic, antara tahun 2005 dan 2009, terutama setelah polisi di 2007 berhasil membongkar basis teroris utama di Poso, Indonesia dipuji sebagai salah satu bentuk kemenangan dunia dalam memerangi terorisme”, tetapi keberhasilan itu hampir semua dalam hal penegakan hukum, bukan pencegahan. Penguatan sisi pencegahan dipertegas dengan dibentuknya BNPT, namun lembaga yang dicetuskan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono ini, belum mampu merumuskan konsep deradikalisasinya dengan baik, terutama dalam konteks deradikalisasi terhadap para napiter dan ex napiter. Program BNPT menurut laporan Asia Report N^o 142 hingga saat ini, sebagian besar

¹⁴ *Ibid.*

telah dilihat secara terpisah dari perkembangan yang lain dan tanpa banyak mempertanyakan mengenai sebab dan akibatnya. Karena itu, penjara tidak hanya menjadi “breeding ground of terrorism” bagi narapidana, tetapi juga tidak berhasil mencegah para ex napiter untuk tidak bergabung kembali dengan ideologi lama mereka.

B. MODEL DISENGAGEMENT NAPI TERORIS POSO

Setiap diskusi seputar keputusan untuk melepaskan teroris dipenjara kembali ke masyarakat menimbulkan pertanyaan yang menantang-di mana mereka akan pergi? Siapa yang akan memonitor mereka? Apakah mereka akan kembali menyinggung perasaan? Bisakah mereka berbalik dari terorisme sementara di penjara? Apakah ada tingkat kepulangan mereka yang membuktikan diterima untuk umum? Selain tantangan keamanan yang diajukan oleh masalah yang berkaitan dengan perubahan perilaku teroris, masalah lain yang muncul adalah kebencian dan perasaan ketidakadilan di antara para korban terorisme bahkan diskusi awal tentang masalah ini banyak diperbincangkan.¹⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, semakin banyak negara telah datang untuk menerima pandangan, implisit atau sebaliknya, bahwa masing-masing kepentingan keamanan nasional dapat dilayani dengan mengeksplorasi

¹⁵ John Morgan dan Kurt Braddock, “Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs”, dalam *Terrorism and Political Violence*, (Routledge, Taylor and Francis Group, 2010)

bagaimana memfasilitasi dan mengelola reintegrasi teroris kembali ke Masyarakat. Secara khusus, persepsi ini telah diungkapkan melalui upaya untuk mengubah perilaku teroris, terutama dengan ‘ ‘ rehabilitasi ‘ ‘ atau sebaliknya ‘ ‘ de-radikalisasi ‘ ‘ mereka yang telah ditahan sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam operasi teroris.¹⁶

Indonesia, misalnya, telah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini, namun, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub A di atas, khususnya konsep deradikalisasi yang ditawarkan BNPT terhadap para mantan napi teroris, telah dianggap belum sempurna konsepnya –untuk tidak menyatakan gagal konsep counter terorismenya. Karena itu, untuk mencairkan kebuntuan konsep ini, kami sepakat dengan Julie Chernov Hwang, Rizal Pangabean, dan Ihsan Ali Fauzi,¹⁷ dalam *The Disengagement of Jihadis in Poso* yang menyatakan bahwa disengagement itu adalah proses gradual dari refleksi internal yang terjadi tidak dalam waktu cepat, tetapi berbulan-bulan bahkan tahunan, terutama dalam hal-kasus di mana seseorang pada akhirnya meninggalkan gerakan radikalnya. Karena konsep ini fokus pada perilaku eks napiter, di sini ada proses panjang yang melibatkan membaca, membahas, berdebat dengan diri sendiri dan dengan teman, termasuk ada sekian banyak

16 *Ibid*

17 Julie Chernov Hwang, Rizal Pangabean, dan Ihsan Ali Fauzi, “The Disengagement of Jihadis in Poso, Indonesia”, dalam *Asian Survey*, Vol. 53 No. 4, July/August 2013, h. 755

pilihan yang bisa diambil. Konsep seperti ini berbeda dengan konsep deradikalisasi BNPT yang mendelegitimasi prinsip ideologis yang mendasari perilaku para eks nabi teroris. Yang berbeda dengan Julie Chernov Hwang, dkk, dengan penulis adalah bahwa proses disengagement ini tidak hanya memutus perilaku kekerasan dari eks napiter, tetapi juga sekaligus mengajak mereka menjadi pejuang perdamaian.

Untuk mengajak mereka menjadi pejuang perdamaian, alat yang digunakan adalah fenomenologi. Meminjam pendapat Creswell, fenomenologi:¹⁸

"is an approach to qualitative research that focuses on the commonality of a lived experience within a particular group. The fundamental goal of the approach is to arrive at a description of the nature of the particular phenomenon".

Sebagai sebuah pendekatan yang fokus pada kesamaan pengalaman hidup dalam kelompok tertentu, maka fenomenologi yang digunakan dalam laporan ini adalah descriptive phenomenology, suatu pendekatan yang melibatkan eksplorasi langsung, analisis, dan deskripsi atas fenomena khusus, dalam hal ini para eks napiter Poso. Ada tiga langkah deskriptif fenomenologi yang telah digunakan dalam penelitian ini: (1) intuisi; (2) menganalisis; dan (3)

18 J. W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among the Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2013, h. 77

menjelaskan. Untuk jelasnya langkah-langkah ini, lihat tabel 1

Tabel 1: Langkah-langkah descriptive phenomenology

Langkah 1 Menggunakan Intuisi	Langkah 2 Menganalisis	Langkah 3 Memaparkan
<p>Peneliti sepenuhnya membaaur dengan para eks napiter sehingga mulai tahu fenomena eks napiter sebagaimana dijelaskan oleh mereka</p> <p>Peneliti menghindari se-mua kritik, evaluasi, atau pendapat mereka dan membayar kesediaan mereka untuk diinvestigasi dengan memperlihatkan empati dan keseriusan kita terhadap diri mereka</p>	<p>Setelah data diperoleh, dianalisis untuk diidentifikasi, lalu dipresentasikan kepada para eks napiter.</p> <p>Di sini, peneliti harus bisa membedakan mana unsur yang penting dan mana yang tidak penting.</p> <p>Dengan cara seperti ini akan terlihat mana yang umum dan mana yang esensi. Karena itu, peneliti harus lebur dengan data selama diperlukan untuk memastikan deskripsi data murni dan akurat</p>	<p>Cara kerja dari pemaparan ini adalah untuk mengkomunikasikan pengalaman hidup eks napiter secara tertulis dalam bentuk deskripsi verbal.</p> <p>Di sini peneliti berupaya mengklasifikasi atau mengelompokkan para eks napiter untuk menghindari deskripsi yang bersifat premature.</p>

Selain pendekatan descriptive phenomenology, laporan penelitian dan pendampingan ini juga diperkuat dengan menggunakan instrument analisis verstehen Max Weber,¹⁹ psikology analysis model John Morgan,²⁰ serta hasil riset

19 Max Weber, translated by Talcot Person, *The Protestant Etcic and The Spirit of Capitalism*, (London and New York: Routledge, 1992)

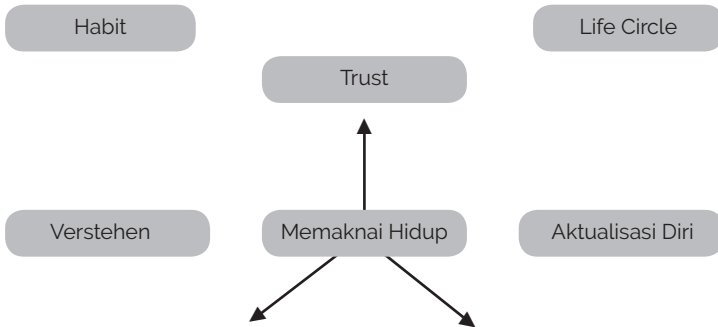
20 John Horgan, "Individual Disengagement", dalam *Leaving Terrorism Behind Individual and Collective Disengagement*, (London and New York: Routledge,

penulis sendiri terkait pola pembinaan mental narapidana teroris, yang secara teoritis-konseptual, rancang bangunnya diinspirasi dari pemikiran Covey Leadership Center,²¹ agar lebih mudah dipahami oleh komunitas eksnapiter. Prosesnya ada tiga, pertama, proses pemahaman atau verstehen, berusaha mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa social dan historis. Di sini, pemahaman tidak sekedar introspeksi akan motifnya atau arti-arti subjektif, tetapi dituntut untuk berempati. Proses kedua, memaknai hidup, melalui tiga proses transformasi identitas yang bersifat triadik: 1. Membangun truth (kepercayaan) kepada para eks napiter, 2. Diskusi lingkaran kehidupan manusia eks napiter, dan 3, Menegaskan habit atau prinsip kebiasaan manusia yang efektif dari Covey Leadership center, dan yang ketiga, aktualisasi diri atau meminjam istilah John Morgan, proses physical, dalam pengertian, 'leaving' or simply moving into a different kind of role. Khusus untuk perubahan peran ini, faktor kunci dalam transformasi, menurut Morgan, dengan meminjam catatan Garfinkel, "was the role played by personal relationships: 'change often hinges on a relationship with a mentor or friend who supports and affirms peaceful behavior". Untuk jelasnya, lihat gambar 3 di bawah ini:

2009), h. 17-27

21 Lukman S. Thahir, dkk, "Paradigma Baru Penanganan Terorisme di Sulteng", *Jurnal IstiQro'*, Vol. 13, 2014

Gambar 3. Proses Teknik Pelepasan



Tempat penelitian di lakukan di Poso Sulawesi Tengah. Mengapa Poso dipilih?. Ada tiga alasan utamanya: Pertama, Poso bisa dikatakan sebagai “koloni” dua organisasi teroris international dunia, al-Qaeda lewat jaringannya JI, dan ISIS lewat Mujahidin Indonesia Timur yang meskipun tokoh tokohnya sudah terbunuh dan dipenjara, tetpi pengaruhnya masih kuat di Poso. Kedua, meski konflik komunal Poso sudah selesai, tetapi ancaman terorisme masih berjalan hingga saat ini, teruama datang dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Ketiga Poso termasuk daerah dimana terpidana eks napiternya terbanyak di Indonesia (Data terlampir).

Teknik pengumpulan data pada saat peneliti melaku-kan riset adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan sebanyak 5 orang eks napiter dilakukan secara purposive sampling, yaitu menen-

tukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sudah diketahui sebelumnya. Seluruh data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferivikasi.